



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DUDI BARMANA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 977417

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.781.626.100**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/77 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.181.626.100

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **638.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI DAKKAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
5. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **58.634.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **6.200.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **4.484.960.100**



III. HUTANG

Rp. 1.646.351.190

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.838.608.910

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.